



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

KB TAK SEBATAS PENGENDALIAN JUMLAH ANAK
Perlu Terobosan untuk Sentuh Kelompok Remaja

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogyakarta menaruh perhatian terhadap keberlangsungan program keluarga berencana (KB). Program tersebut dinilai tidak sebatas pengendalian jumlah anak melainkan keluarga yang memiliki perencanaan kuat agar mampu sejahtera. Sehingga program itu pun perlu disosialisasikan sejak dini dan menyentuh kalangan anak, remaja, dewasa, orangtua maupun lansia.

Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi SE MM, mengungkapkan muara atas keberhasilan program KB ialah kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu remaja juga memiliki peran penting agar sebelum merajut pernikahan telah memiliki perencanaan matang. "Sosialisasi untuk kalangan remaja ini perlu terobosan. Bagaimana agar remaja juga tertarik dan ikut mendukung program KB," ungkapnya.

Keterlibatan para remaja dalam berbagai program di pemerintah kerap kali masih cukup rendah. Fahmi mencontohkan, meski posyandu remaja sudah terbentuk di Kota Yogya namun ketika di-

M Ali Fahmi SE MM
Komisi D



KR-istimewa

dang mengikuti sosialisasi ternyata tingkat kepesertaannya masih minim. Berbeda dengan posyandu lansia yang cukup aktif berkegiatan.

Menurut Fahmi, selama ini banyak yang masih beranggapan titik tekan program KB ialah dua anak cukup atau dua anak lebih baik. Padahal di dalamnya juga ada kegiatan pemberdayaan ekonomi guna mendukung kesejahteraan keluarga. Sehingga ketika memiliki anak lebih dari dua maka kesejahteraan anak maupun keluarga tetap terjamin. "Kesejahteraan ini pun tidak sebatas kuat dari aspek ekonomi tetapi juga kesehatan dan pertumbuhan anak. Makanya saling berkaitan juga dengan bebas stunting yang sekarang cukup digencarkan di Kota Yogya. Harapan kami, OPD di lingkungan Pemkot juga bisa saling bersinergi untuk keberhasilan program KB secara menyeluruh," urainya.

Pihaknya di lembaga dewan juga berkomitmen mendukung keberlangsungan program tersebut. Misalnya dari aspek anggaran, sejauh ini setiap usulan program yang berkaitan dengan masyarakat tidak pernah dicoret. Begitu pula menyangkut legislasi sudah dipayungi melalui peraturan daerah (perda) terkait ketahanan keluarga. Perda tersebut merupakan produk hukum inisiatif dewan sehingga keberlangsungan program KB hingga soal penganggarnya memiliki payung yang jelas.

(Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005